

DAMPAK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL TERHADAP KEMISKINAN DI SUMATERA UTARA

Nama Penulis_1, Erwin Andy Osland Situmorang 2, Anwar Sadat Harahap 3. Elimar Sinaga
4. Tuty Alawiyah Lubis
Instansi/afiliasi penulis_Kanwil DJPb Prov. Sumut

Abstract

The number of people living in poverty increased significantly due to the global pandemic of Covid-19 in the Province of Sumatera Utara. The Government of Indonesia launched the Social Protection Program to slow down the poverty rate. This study attempts to find the effectiveness of the Social Protection Program and determines which programs in the Social Protection that contributes significantly in slowing down or reducing the poverty rate in Sumatera Utara. Utilizing the fixed-effect model regression, we find that the Social Protection Program undertaken by the government has effectively reduce the poverty rate in Sumatera Utara. The Cash Transfers Program (Program Bantuan Sosial Tunai) and the Pwork Program contribute significantly in reducing poverty. This findings may provide useful information in designing The Social Protection after the Pandemic ends.

Abstrak

Pandemi global Covid-19 memberikan dampak terhadap kenaikan di Provinsi Sumatera Utara. Pemerintah dengan Program Perlindungan Sosial telah berusaha untuk menekan laju pertumbuhan kemiskinan. Studi ini berusaha untuk menentukan apakah Program Perlindungan Sosial yang dilaksanakan pemerintah dapat secara efektif memperlambat laju kemiskinan di Sumatera Utara. Selain itu, studi ini juga berusaha menentukan program Perlindungan Sosial mana yang memberikan efek terbesar dalam menekan pertumbuhan penduduk miskin di regional Sumatera Utara. Menggunakan *fixed effect model regression* kami menemukan bahwa Program Perlindungan Sosial efektif dalam menekan laju pertumbuhan penduduk miskin dan Program Perlindungan Sosial yang paling berpengaruh terhadap penekanan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara adalah Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Prakerja. Temuan ini diharapkan dapat bermanfaat dalam desain Perlindungan Sosial setelah pandemi Covid-19 berlalu.

Keywords: Bantuan, Covid-19, Kemiskinan, Pandemi, Perlindungan, Sosial,

JEL Classification:

E240, E620, H530.

PENDAHULUAN

Virus Covid-19 pertama kali terdeteksi di Kota Wuhan-China pada Desember 2019 dan secara resmi pada 11 Maret 2020 oleh *World Health Organization* (WHO) diumumkan sebagai pandemi global. Pada Juni 2020 virus ini telah menyebar ke seluruh dunia dengan kasus terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 418 juta kasus dan 5,85 juta kematian per tanggal 17 Februari 2022. Berbagai upaya dilakukan oleh berbagai negara guna menekan angka penyebaran kasus, mulai dari penerapan Protokol Kesehatan, peningkatan imunitas tubuh melalui edukasi, *testing and tracing*, larangan bepergian/*travel advice*, hingga penutupan akses masuk atau keluar/*lockdown*.

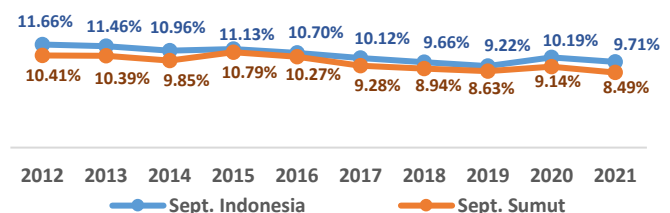
Indonesia sendiri mengkonfirmasi kasus pertama Covid-19 pada Maret 2020. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Indonesia menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai salah satu upaya pencegahan penularan dan penanganan Covid-19 dengan menekan mobilitas masyarakat di samping tetap menekankan penerapan protokol kesehatan. Dalam rangka konsistensi meningkatkan pengendalian penyebaran di pusat dan daerah diberlakukan juga Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada kota dan kabupaten. Akibatnya, sejumlah aktifitas yang biasanya dilakukan dengan tatap muka beralih menjadi virtual/komunikasi jarak

jauh dengan menggunakan sarana digital. Penerapan metode *school from home* (sfh), *work from home* (wfh) hingga maraknya penggunaan media aplikasi zoom, *google meet* dan sebagainya merupakan dampak peralihan. Sejumlah Langkah penerapan Covid-19 ini menimbulkan konsekuensi berhentinya aktifitas ekonomi hampir di semua sektor baik formal maupun informal yang berpengaruh besar terhadap daya beli masyarakat itu sendiri.

Menurut data dari Kementerian Tenaga Kerja, hampir 85% pekerja dirumahkan akibat kantor/perusahaan tempat mereka bekerja tidak dapat beroperasi sebagai dampak penerapan PPKM.

Sementara berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan di Indonesia pada periode Maret 2012-September 2019 (sebelum pandemi Covid-19) cenderung mengalami penurunan, kecuali pada tahun 2015. Pada periode September 2019 tingkat kemiskinan turun di angka

Grafik 1. Profil Kemiskinan Indonesia dan Sumatera Utara Periode September 2012-2021



9,22% dan yang kemudian naik menjadi 10,19% sebagai dampak pandemi pada tahun 2020.

Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia dan merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di luar pulau Jawa dengan kepadatan penduduk 207,40 jiwa/km² (Wikipedia). Menurut Badan Pusat

Statistik, jumlah penduduk Sumatera Utara mencapai 14.936.148 (update 4 Maret 2022). Jumlah penduduk Sumut ini memegang proporsi 10,83% dari total proyeksi penduduk Indonesia tahun 2022. Tabel 1 menunjukkan tingkat kemiskinan Sumatera Utara sejalan dengan penurunan/kenaikan Indonesia.

Pasca dilanda badai Covid-19, berbagai badan ekonomi internasional seperti World Bank memperkirakan pandemi akan mengikis pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga berada pada kisaran -3,5% sampai 2,1% pada tahun 2020. Senada dengan prediksi World Bank, *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 0,5% pada tahun 2020. Menurut *Oxford Economics*, pertumbuhan ekonomi Indonesia terkontraksi -0,8%. Prediksi ini tentu menjadi koreksi tajam dimana tingkat pertumbuhan pada tahun 2019 mencapai 5,02%.

Sementara dari sisi dampak kemiskinan dan tingkat pengangguran, Lembaga penelitian Smeru memperkirakan akan terjadi tambahan sekitar 1,3 juta hingga 8,4 juta (+0,56% sampai 3,2%) penduduk miskin pada tahun 2020. Senada dengan Smeru, *Asian Development Bank* (ADB) memproyeksikan kemiskinan di Indonesia akan bertambah sekitar 6,9 juta hingga 9,6 juta (2,6% sampai 3,6%) penduduk miskin. Kementerian Keuangan sendiri sebagai kementerian negara yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara memprediksikan pertambahan penduduk miskin sebesar 1,16 juta hingga 2,78 juta (+0,44% hingga 1,41%), tergantung derajat kerusakan ekonomi

yang akan terjadi. Jumlah pengangguran diproyeksikan bertambah 2,91 juta hingga 5,23 juta (2,17% hingga 3,79% angkatan kerja) pada tahun 2020.

Melihat potensi krisis yang akan terjadi, pemerintah Indonesia merancang berbagai kebijakan untuk melindungi masyarakat, ekonomi, keuangan, serta kesehatan sebagai prioritas utama. Salah satunya adalah pengalokasian anggaran untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang pada tahun 2020 mencapai Rp695,2 triliun. Terdapat 5 (lima) program penyelenggaraan PEN pada tahun 2020 yaitu Penanganan Kesehatan, Perlindungan Sosial (Perlinsos), Program Prioritas, Dukungan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) atau korporasi, serta Insentif Usaha. Dari total anggaran PEN saat itu, alokasi terbesar dimiliki Program Perlinsos sebanyak 31,15% diikuti Dukungan UMKM atau korporasi sebanyak 24,88%. Pada tahun 2021, pemerintah menaikkan alokasi anggaran untuk PEN menjadi Rp744,7 triliun guna kebutuhan vaksinasi Covid-19 serta biaya perawatan pasien Covid-19 yang dipicu munculnya varian baru. Alokasi anggaran yang luar biasa ini diharapkan dapat menolong pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak jatuh begitu dalam terutama menopang ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat memicu melonjaknya angka kemiskinan.

Sebagaimana tujuan dari Program Perlinsos, tulisan ini akan menganalisis bagaimana Kluster Perlindungan Sosial (Perlinsos) berpengaruh terhadap kemiskinan di Sumatera Utara. Tulisan ini juga akan mengkaji komponen pada Program Perlinsos yang memberikan dampak signifikan terhadap kemiskinan

serta memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan untuk keberlangsungan penerapan Program Perlinsos.

TINJAUAN LITERATUR

1. Perlindungan Sosial

Asian Development Bank (ADB) menjelaskan bahwa Perlindungan Sosial pada dasarnya merupakan sekumpulan kebijakan dan program yang dirancang untuk menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya peningkatan dan perbaikan kapasitas penduduk dalam melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan.

Menurut *International Labour Organization* (ILO), Perlindungan Sosial merupakan bagian dari kebijakan sosial yang dirancang untuk menjamin kondisi keamanan pendapatan serta akses dalam layanan sosial bagi semua orang, dengan memberikan perhatian khusus kepada kelompok-kelompok yang memiliki kerentanan, serta melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam semua siklus kehidupan (ILO, 2012). Menurut Barrientos dan Shepherd (2003), Perlindungan Sosial secara tradisional dikenal sebagai konsep yang lebih luas dari jaminan sosial, lebih luas dari asuransi sosial, dan lebih luas dari jejaring pengaman sosial. Suharto (2007) mendefinisikan Perlindungan Sosial sebagai kumpulan upaya publik yang dilakukan dalam menghadapi dan menanggulangi kerentanan, risiko dan kemiskinan yang sudah melebihi batas.

2. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis koronavirus (wikipedia). Penderita penyakit ini dapat mengalami demam, batuk kering, sakit tenggorokan, pilek, dan kesulitan bernafas. Pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multiorgan. Virus ini menyebar melalui percikan pernapasan dari saluran pernapasan yang dikeluarkan saat sedang batuk atau bersin. Sebuah penelitian di Jepang mempelajari kemungkinan penularan dapat terjadi melalui percikan pernapasan mikro yang melayang-layang di udara.

3. Program Keluarga Harapan (PKH)

adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepala Keluarga Miskin yang ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Sejak tahun 2007 Indonesia telah menerapkan PKH sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. PKH merupakan sebuah program bantuan sosial bersyarat seperti diperuntukkan bagi keluarga miskin terutama ibu hamil dan anak, penyandang disabilitas dan lanjut usia untuk dapat mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai amanat konstitusi dan Nawacita Presiden Republik Indonesia. Dalam kajian yang dilakukan oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan bekerja sama dengan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia menunjukkan bahwa efektifitas bansos PKH dapat membantu memenuhi kebutuhan

dan menurunkan angka kemiskinan di range 5-7 persen per Rp100 triliun anggaran yang dikeluarkan (Martha Carolina, 2020).

4. **Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ditransformasikan menjadi Program Sembako**

merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada KPM setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerja sama dengan bank. Bahan pangan yang dapat dibeli adalah: 1) Sumber Karbohidrat, seperti beras, jagung, sagu; 2) Sumber Protein nabati, seperti kacang-kacangan, tempe, tahu; 3) Sumber Protein Hewani, seperti telur, daging ayam, daging sapi, ikan segar; 4) Sumber Vitamin dan Mineral, seperti sayur-mayur, buah-buahan.

5. **Bansos Tunai (BST)** adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari wabah Covid-19. Kriteria penerima adalah Kepala Keluarga yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos RI dan tambahan usulan dari daerah. Pemerintah menyiapkan Bansos Tunai melalui Kementerian Sosial untuk meningkatkan daya beli dan daya serta menjadi daya ungkit efektif terhadap roda perekonomian khususnya pada kuartal ketiga tahun 2020.

6. **Kartu Prakerja** adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk

pencari kerja, pekerja ter-PHK atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Target penerima manfaat adalah bagi 5,6 juta orang pekerja (dengan total anggaran Rp20 triliun) terdampak COVID-19 (ter-PHK, dirumahkan dengan *unpaid leave*, maupun yang mengalami penurunan *income*). Untuk menjadi pemegang Kartu Prakerja yang sah, calon penerima harus lulus melalui proses pendaftaran *online*, tes minat bakat, dan seleksi *batch* berdasarkan domisili.

7. **Bantuan Langsung Tunai (BLT)**

adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Negara yang pertama kali memprakarsai BLT adalah Brasil, yang selanjutnya diadopsi oleh negara-negara lainnya. Indonesia sendiri menerapkan program BLT untuk masyarakat desa sebagai salah satu bentuk program jaring pengaman sosial (*social safety net*) yang diperuntukkan bagi warga yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Pemberian BLT Desa kepada masyarakat harus memenuhi kriteria keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan serta tidak termasuk penerima bantuan program pemerintah lainnya. BLT Desa diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat di pedesaan. Jika perputaran ekonomi di lapisan masyarakat terendah dapat bergerak, maka pada akhirnya dapat

menguatkan perekonomian di tingkat nasional.

8. **Kemiskinan** merupakan kondisi yang serba tidak cukup (tidak layak) yang dialami individu. (Ritonga, 2003). Untuk mengukur kemiskinan, BPS mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh *Worldbank*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan dihitung dari hasil survei Sosial Ekonomi nasional (Susenas) yang diterbitkan dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Maret dan September.

9. **Penelitian Terdahulu**

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini:

1. Muhammad Rizki (2021) meneliti tentang dampak program perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di tengah Covid-19 di Indonesia dengan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penanganan pandemi telah direalisasikan dan berdampak, ditunjukkan pada sedikitnya jumlah peningkatan persentase penduduk miskin pada masa pandemi.
2. Hengki Setiawan Hadi (2018) memfokuskan penelitian dampak program perlindungan sosial terhadap pendapatan

rumah tangga miskin pada provinsi Jawa Timur menggunakan teknik analisis persamaan simultan metode *three stage least square*. Hasil analisa menunjukkan bahwa program perlindungan sosial telah efektif dalam mengurangi kemiskinan Di Jawa Timur, hal ini diindikasikan dari program bantuan sosial berpengaruh positif terhadap kapasitas dasar. Kapasitas dasar dan intervensi pasar tenaga kerja berpengaruh positif pada kapasitas usaha. Sedangkan jaminan sosial, sesuai dengan sifatnya, hanya menjaga agar rumah tangga miskin tidak menjadi lebih miskin, tetapi tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga miskin.

3. Dewi (2021) meneliti tentang pengaruh BLT terhadap kemiskinan di Indonesia periode 2006-2015 menggunakan analisis korelasi kualitatif. Studi ini menemukan bahwa program bantuan tunai langsung berdampak pada kemiskinan di Indonesia.
4. Hevine Gultom (2020) melakukan analisis pengaruh program BPNT dan Program PKH terhadap Kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPNT berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan PKH berpengaruh positif terhadap

kemiskinan akan tetapi tidak berpengaruh secara signifikan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, mengambil populasi seluruh daerah di wilayah Sumut yaitu sebanyak 33 Kabupaten/Kota. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu tingkat kemiskinan dan realisasi anggaran program PEN Klaster Perlindungan Sosial (PKH, Sembako, Prakerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Bantuan Langsung Tunai) tahun 2020 – 2021 pada 33 Kabupaten/Kota regional Sumatera Utara. Bantuan Subsidi Upah tidak dimasukkan ke dalam penelitian karena data tidak tersedia. Data Tingkat Kemiskinan bersumber dari Badan Pusat Statistik Sumatera Utara dan data realisasi anggaran program PEN Klaster Perlindungan Sosial bersumber dari OMSPAN.

Tingkat Kemiskinan bertindak sebagai variabel independen, sedangkan lima variabel lainnya yaitu program PEN Klaster Perlinsos bertindak sebagai variabel dependen. Sehingga metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel.

Berikut persamaan regresi untuk melihat pengaruh program PEN Klaster Perlinsos terhadap tingkat kemiskinan dalam penelitian ini:

$$TK_{it} = \alpha_0 + \beta_1 PKH_{it} + \beta_2 SEM_{it} + \beta_3 PRA_{it} + \beta_4 BST_{it} + \beta_5 BLT_{it}$$

di mana:

TK	=	Tingkat Kemiskinan
α_0	=	Konstanta
$\beta_1 - \beta_5$	=	Koefisien regresi variabel independen terhadap Tingkat Kemiskinan
PKH	=	Realisasi Program PKH
SEM	=	Realisasi Program Sembako

PRA	=	Realisasi Program Prakerja
BST	=	Realisasi Program Bantuan Sosial Tunai
BLT	=	Realisasi Bantuan Langsung Tunai
μ	=	error term
i	=	kab/kota
t	=	tahun

Analisis regresi data panel dilakukan dengan tiga model yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Langkah pertama yang dilakukan adalah pemilihan model yang tepat dari ketiga model yang tersedia, yang selanjutnya digunakan sebagai model yang cocok untuk diambil interpretasi atau keputusan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdapat 3 model dalam analisis regresi data panel yaitu *common effect model*, *fixed effect model*, dan *random effect model*. Langkah pertama yang dilakukan adalah pemilihan model yang tepat dari ketiga model yang tersedia. Setelah dilakukan pemilihan model, maka penelitian ini lebih tepat menggunakan model Fixed Effect Model. Diasumsikan data sudah memenuhi asumsi klasik yaitu berdistribusi normal, bebas dari heteroskedastisitas, bebas dari autokorelasi, dan bebas dari multikolinearitas.

Dilakukan uji F atau ANOVA untuk menguji pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Tabel 1. Hasil Estimasi Refresi Data Panel Fixed Effect Model

Dependent Variable: TK
 Method: Panel Least Squares
 Date: 03/10/22 Time: 10:25
 Sample: 2020 2021
 Periods included: 2
 Cross-sections included: 27
 Total panel (balanced) observations: 54

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	27.43024	5.398997	5.080618	0.0000
PKH	-0.039445	0.059821	-0.659381	0.5165
SEBAKO	0.041412	0.027724	1.493736	0.1494
PRAKERJA	-0.219766	0.047813	-4.596322	0.0001
BST	-0.370476	0.202822	-1.826606	0.0814
BLT	-0.086227	0.078886	-1.093052	0.2862

Effects Specification			
Cross-section fixed (dummy variables)			
R-squared	0.999789	Mean dependent var	11.22852
Adjusted R-squared	0.999491	S.D. dependent var	5.026883
S.E. of regression	0.113363	Akaike info criterion	1.229193
Sum squared resid	0.282728	Schwarz criterion	0.050536
Log likelihood	65.18821	Hannan-Quinn criter.	0.774631
F-statistic	3361.047	Durbin-Watson stat	3.857143
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber: Hasil Output Eviews 10

Berdasarkan hasil estimasi parameter Tabel 1.1, berikut persamaan regresi data panel atas variabel penelitian ini.

$$TK_{it} = 27,43 - 0,039LnPKH_{it} + 0,04LnSEBAKO_{it} - 0,22LnPRAKERJA_{it} - 0,37LnBST_{it} - 0,09LnBLT_{it} + \mu_{it}$$

Dilakukan uji F atau ANOVA untuk melihat apakah terdapat pengaruh seluruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan Tabel 1.1, nilai probability F-Statistics sebesar 0,000, nilai ini lebih kecil dari nilai signifikansi α 10% sehingga dapat dinyatakan bahwa seluruh variabel independen yaitu Program PKH, Sembako, Prakerja, BST, dan BLT secara bersama-sama atau simultan

berpengaruh terhadap variabel tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya, dilakukan uji t untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen yaitu Tingkat Kemiskinan. Berikut hasil uji t:

1. Program PKH berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara dengan taraf signifikansi α 10%.
2. Program Sembako berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara dengan taraf signifikansi α 10%.
3. Program Prakerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara dengan taraf signifikansi α 10%.
4. Program BST berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara dengan taraf signifikansi α 10%.
5. Program BLT berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara dengan taraf signifikansi α 10%.

Besar proporsi variasi variabel tingkat kemiskinan di Sumatera Utara yang dapat dijelaskan oleh semua variabel independen yaitu program PEN klaster perlindungan sosial adalah sebesar 99,97% sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain. Artinya, model fixed effect model sudah sangat baik menjelaskan hubungan variabel program PKH, Sembako, Prakerja,

BST, dan BLT dengan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.

Model persamaan regresi data panel di atas diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 27,43 menandakan bahwa tingkat kemiskinan Sumatera Utara diestimasi sebesar 27,43 persen dengan asumsi Program PKH, Sembako, Prakerja, BST, dan BLT konstan.
2. Program PKH berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan koefisien sebesar 0,039 menandakan bahwa setiap kenaikan anggaran program PKH sebesar 1 satuan akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara sebesar 0,039 poin satuan.
3. Program Sembako berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan koefisien sebesar 0,041 artinya setiap kenaikan anggaran program sembako sebesar 1 satuan akan berdampak pada kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,04 satuan.
4. Program Prakerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara, dengan besar koefisien 0,22 menandakan bahwa setiap kenaikan anggaran program prakerja sebesar 1 satuan akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara sebesar 0,22 poin satuan.
5. Program BST berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara, dengan besar koefisien 0,37 menandakan bahwa setiap kenaikan anggaran program BST sebesar 1 satuan akan berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara sebesar 0,37 poin satuan.
6. Program BLT berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, dengan koefisien sebesar 0,086 menandakan bahwa setiap kenaikan anggaran program BLT sebesar 1 satuan akan menyebabkan penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara sebesar 0,086 poin satuan. Hal ini diduga data sebaran BLT tidak merata di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara dimana dari 33 Kabupaten/kota, hanya 27 kabupaten/kota yang menerima BLT Dana Desa.

Adanya dampak program perlindungan sosial secara bersama-sama terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara sejalan dengan hasil penelitian Muhammad Rizki (2021) yang meneliti hal yang sama namun ruang lingkup yang digunakan adalah Indonesia dan dengan metode berbeda. Hasil ini menguatkan hipotesis serta tujuan adanya program ini yaitu untuk mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial di masa pandemi Covid-19 sudah terlaksana, khususnya di Sumatera Utara. Begitupun dengan adanya

pengaruh penyaluran BST terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Utara sejalan dengan hasil penelitian Hengki Setiawan Hadi (2018) yang memfokuskan penelitiannya di Jawa Timur dengan metode simultan metode three stage least square. Sedangkan pengaruh Prakerja terhadap tingkat kemiskinan belum ditemukan penelitian yang relevan sehingga hasil penelitian ini bisa menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil estimasi dan analisis mengenai pengaruh program PEN klaster perlindungan sosial terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara selama periode 2020-2021 maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Seluruh program PEN klaster perlindungan sosial yaitu Program PKH, Sembako, Prakerja, BST, dan BLT berpengaruh signifikan secara bersama-sama atau simultan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menandakan bahwa penyaluran program PEN khususnya klaster perlindungan sosial sudah cukup efektif dan tepat sasaran sehingga mampu menekan angka kemiskinan di Sumatera Utara ditengah pandemi Covid-19.

Program PEN klaster perlindungan sosial yang paling berpengaruh terhadap penekanan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara adalah Program Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Program Prakerja. Program BST dan Prakerja hadir diperuntukkan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19. BST untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, sedangkan Prakerja untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja masyarakat. Pemerintah

mengucurkan dana sebesar Rp1,4 triliun pada program BST dan Rp400,1 miliar pada program Prakerja. Meski mengalami penurunan anggaran pada tahun 2021, program ini memberikan dampak yang signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Sumatera Utara.

Tingkat kemiskinan di Sumatera Utara diestimasi akan mencapai 27,43 persen jika program PEN klaster perlindungan sosial ini tidak ada, artinya program ini mampu menekan tingkat kemiskinan hingga 204,44% atau sebesar 18,42 poin di tahun 2021.

Namun, pemerintah perlu meningkatkan efektifitas penyaluran program PKH, Sembako, dan BLT karena masih sangat diperlukan dalam mengatasi kemiskinan dan kerentanan sosial khususnya dimasa pandemi, melalui perbaikan konsumsi rumah tangga masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah dapat mengkaji ulang kembali mengenai besaran nilai yang diberikan, sasaran program, hingga permasalahan database yang belum mutakhir dan keakurasian data-data penerima.

Bagi kabupaten/kota yang tidak menerima BLT agar diberikan program bantuan lainnya karena dampak pandemi Covid-19 terjadi di seluruh kabupaten/kota.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pembuat kebijakan sebagai bahan masukan dalam membuat kebijakan yang lebih baik di masa yang akan datang. Penelitian berikutnya disarankan dapat melakukan survei persepsi dampak penyaluran program PEN klaster perlindungan sosial difokuskan pada satu wilayah kerja atau

provinsi untuk mendapatkan kesimpulan atau justifikasi yang lebih komprehensif. Penelitian juga dapat mengeksplorasi metode lain seperti *Structural Equation Model*.

REFERENSI

1. Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). *Program Keluarga Harapan (PKH): Antara perlindungan sosial dan pengentasan kemiskinan*. Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 4(1), 88-92.
2. Beni, S., & Manggu, B. (2020). *Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Perbatasan*. Sosio Konsepsia, 9(2).
3. Gultom, H., Kindangen, P., & Kawung, G. M. (2021). *Analisis pengaruh Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 21(1), 39-53.
4. Habibullah, H. (2017). *Perlindungan Sosial Komprehensif di Indonesia*. Sosio Informa, 3(1).
5. Putra, T., & Medinal, M. (2019). *ANALISIS PENGARUH PENDIDIKAN, PENGANGGURAN, DAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI TERHADAP KEMISKINAN DI KELURAHAN TUATUNU INDAH KOTA PANGKALPINANG*. Jurnal Progresif Manajemen Bisnis, 6(5), 337-347.
6. Wiwit, W. (2020). *Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kota Batu* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
7. Nasution, A., Krisnamurthi, B., & Rachmina, D. (2020, March). *Analisis permintaan pangan rumah tangga penerima manfaat Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kota Bogor*. In Forum Agribisnis: Agribusiness Forum (Vol. 10, No. 1, pp. 1-10).
8. Kharismawati, I. S., & Rosdiana, W. (2018). *Implementasi Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) Melalui E-Warung di Kelurahan Sidosermo Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya*. Publika, 6(8).
9. Fadlurrohlim, I., Nulhaqim, S. A., & Sulastris, S. (2019). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus di Kota Cimahi)*. Share: Social Work Journal, 9(2), 122-129.
10. Eko Yudianto, Y. (2019). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo*.
11. Juwono, V., & Vedy, N. K. (2020, August). *Analysis of The Implementation of Non-cash Food Assistance (BPNT) Program for Reducing Poverty in Sub-district Panjang, Bandar Lampung 2018*. In ICAS-PGS 2019: Proceedings of the 3rd International Conference on Administrative Science, Policy, and Governance Studies, ICAS-PGS 2019, October 30-31, Universitas Indonesia, Depok. Indonesia (p. 226). *European Alliance for Innovation*.

12. Iwan Hermawan, S. P., Izzaty Izzaty ST, M. E., Budiyantri, E., Rafika Sari, S. E., Sudarwati, Y., IP, S., ... & Sos, S. (2021). *Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai di Kota Yogyakarta*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, 12(2), 131-145.
13. Barrientos, A., & Hulme, D. (Eds.). (2016). Social protection for the poor and poorest: Concepts, policies and politics. Springer.
14. Jaya, I. G. N. M., & Sunengsih, N. (2009). *Kajian analisis regresi dengan data panel*. In Prosiding Seminar Nasional Penelitian. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
15. Rizki, M. (2021). DAMPAK PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19. Jurnal Good Governance, 17(2).
16. <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020>. Diakses tanggal 10 maret 2022.
17. ourworldindata.org. Diakses tanggal 17 Februari 2022.
18. covid19.go.id. Diakses tanggal 17 Februari 2022.